

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998, pemerintah baru tersadar bahwa usaha besar yang dibangga-banggakan justru sebagian besar mengalami kebangkrutan dan memberikan beban berat bagi negara dan bangsa, sebaliknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dipandang sebelah mata mampu bertahan dan bahkan berkembang. Ekonom kerakyatan, pejuang reformasi, atau peneliti ekonomi dari Bank Dunia hampir bulat menyepakati bahwa usaha kecil dan menengah paling tahan terhadap guncangan krisis moneter (SMECDA, 2006). Menurut Radhi (2008) dalam sistem ekonomi kerakyatan, pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai potensi dan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi khususnya, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Agus, 2014).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bagaimana kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya yang paling utama yaitu masalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi keterbatasan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi. Menurut Suharni (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

Dalam praktek pengusaha mikro biasanya membutuhkan kredit dalam jumlah kecil, dengan jangka waktu pendek dengan angsuran yang sering. Oleh karena itu, apabila tersedia pengikat agunan fisik secara notaris atau harga tetap, namun sangat tidak ekonomis. Oleh karena itu alternatif yang cocok kredit bagi pengusaha mikro menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng dapat terjadi dalam satu kelompok nasabah.

Berdasarkan data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa pada umumnya 81,41 persen dari usaha mikro dan kecil tidak pernah menerima bantuan dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kebanyakan alasan utama usaha mikro dan kecil tidak menerima bantuan dari koperasi maupun non koperasi adalah karena tidak tahu ada bantuan (sebesar 55,95 persen), tidak tahu prosedur (13,99 persen), dan proposal ditolak (1,45 persen). Dari data yang ada ini dapat dilihat bahwa peran lembaga keuangan dalam menyediakan dana dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil masih belum terlihat.

Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan. Usaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk BMT. BMT merupakan lembaga keuangan non bank dan lebih berorientasi pada pemberdayaan (Ridwan, 2004). Lembaga ini sebenarnya merupakan lembaga swadaya masyarakat yang di dirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal waa Tanwil (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Menurut Setyo Heriyanto meyakini bahwa BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.

Keberadaan dari BMT di Indonesia, tak lepas dari peran dari berbagai pihak khususnya regulator, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Bahkan keberadaan dari BMT juga menjadi alternatif financial inclusion ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan. Dari situs berita online tempo (November 2012) dilaporkan bahwa aset BMT tumbuh setiap tahunnya. Menurut Ketua umum dewan pimpinan pusat perhimpunan BMT indonesia, Joelarso, mengatakan bahwa pertumbuhan aset BMT tersebut seiring dengan tumbuhnya jumlah BMT di daerah-daerah.

Proses pembiayaan menggunakan sistem tanggung renteng melalui musyawarah dalam kelompok. Menurut Syaiful (2008) menyatakan tentang sistem tanggung renteng bahwa:

Sistem tanggung renteng juga diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut plafon yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota, minimal menjadi anggota kelompoknya.

Selain menerapkan pembiayaan dengan sistem tanggung perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan UMKM lebih utama karena masyarakatlah sebagai pelaku usaha tersebut sehingga keberhasilan pengembangan UMKM berawal dari sini. Menurut Ravik (2007) menyatakan bahwa “Dalam pemberdayaan UKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang-peluang dan fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan”. Menciptakan suatu UMKM memang tidak mudah diperlukan modal yang cukup dan keterampilan dalam mengelola usaha. Dengan adanya otonomi daerah yang dimana pemerintah mengatur secara langsung kegiatan ekonomi daerahnya sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Yogyakarta merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan yang setiap tahunnya selalu dikunjungi oleh pendatang baru dan wisatawan, baik

domestik maupun mancanegara. Potensi tersebut akan mendorong adanya pertumbuhan usaha baru bagi beberapa sektor usaha khususnya sektor rill. Sehingga, peran sumber permodalan khususnya lembaga keuangan mikro syariah sangat mendukung bagi pengembangan UMKM yang tidak *bankable*, sehingga usaha mikro tersebut dapat lebih prospek dan berkembang. Selain itu Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan potensi usaha mikro dan kecil yang besar. Berikut data perkembangan UMKM dari tahun 2010-2014 di Yogyakarta:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah D.I Yogyakarta
DISPERINDAGKOP dan UMK D.I Yogyakarta
Bidang Koperasi dan UKM
Tahun 2010-2014

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Usaha Mikro	100.227	111.086	111.591	111.912	73.647
Usaha Kecil	45.558	50.494	50.999	51.459	39.556
Usaha Menengah	27.335	30.296	30.801	31.121	23.641
Total	173.123	191.876	193.391	194.492	136.844

Sumber: Disperindagkop dan UMK D.I Yogyakarta Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan UMKM di D.I Yogyakarta dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal dan eksternal yang dihadapi UMKM. Masalah internal meliputi, yaitu: *pertama*, rendahnya kualitas

sumberdaya manusia UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. *Kedua*, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan *ketiga*, terbatasnya akses pengusaha UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar serta faktor produksi lainnya. Untuk itu mengingat keberadaan UMKM dan perannya sangat besar dalam perekonomian Indonesia, maka diperlukannya akses permodalan UMKM.

Lembaga keuangan mikro islam yang berorientasi pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Yogyakarta adalah koperasi syariah. Pertumbuhan koperasi syariah di Yogyakarta pada tahun 2015 cukup signifikan mengalami pertumbuhan aset rata-rata 40 persen per tahun sehingga tercatat sekitar 40 koperasi Syariah yang ada di wilayah ini (Saiful Rijal, *TribunJogja.com*, 2015).

Salah satu koperasi syariah di Yogyakarta yang banyak bergerak di sektor produktif adalah BMT KUBE Sejahtera Sleman. Untuk menjawab permasalahan di atas BMT KUBE Sejahtera Sleman membuat suatu program pembiayaan yang mana berguna untuk memberikan pembiayaan kelompok terhadap pelaku usaha mikro perempuan yang mana dalam kehidupan nyata seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga. Dengan keadaan ini perempuan tidak lagi memandang perannya didalam masyarakat atau keluarga hanya sebatas sebagai istri atau ibu saja, tetapi mereka dapat mengembangkan diri dengan melakukan peran yang lain yaitu pekerjaan di luar rumah. Selain itu pergeseran budaya dari masyarakat modern memberikan peluang bagi

kaum perempuan untuk menyejajarkan diri dengan kaum laki-laki dalam hal berprestasi (Nanik, 2007).

Berkaitan dengan gender, di zaman globalisasi sekarang ini dunia berubah dengan cepat di segala bidang kehidupan. Keadaan ini mendorong terjadinya perubahan sosial dimana-mana. Perubahan besar juga terjadi pada kaum perempuan. Kaum perempuan mulai menunjukkan kebutuhan mereka untuk dapat berprestasi atau mencapai suatu keberhasilan sebagai salah satu cara mengaktualisasikan dirinya (Riyanti, 2007).

Berdasarkan sumber data world bank tahun 2007 yang telah diolah kembali, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia 51,7 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 88,5 persen (Sari Lestari, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih rendah dibanding tingkat partisipasi kerja laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan keterbatasan yang di hadapi oleh perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, keterampilan dan pendidikan yang rendah, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga serta kendala yang dikenal dengan istilah "*triple burden of woment*", yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial bersamaan dimasyarakat.

Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan pemerintah sejak 1978 untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, kemajuan dan keberhasilan tersebut belum dapat

mengena secara merata pada sebagian besar perempuan terlebih pada perempuan pedesaan yang mengalami berbagai ketertinggalan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, maka perempuan yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia dapat menjadi beban pembangunan yang berpotensi (Riant, 2008).

Untuk dapat melibatkan perempuan yang secara kualitas masih rendah diperlukan sebuah upaya yang nyata dan berkesinambungan salah satunya yaitu dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Menurut Sulistyani, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistyani, 2004).

Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan perempuan berarti upaya menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua dimensi kehidupan. “program program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga” (Sunyoto, 2004). Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga maka menuntut perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan salah satu dorongan yang kuat bagi perempuan untuk bekerja dalam menambah penghasilan.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng yang ditetapkan oleh BMT akan mengurangi resiko kredit macet, karena prinsip tanggung renteng mengharuskan setiap kelompok harus bertanggung jawab secara bersama-sama, pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng juga mendukung kesejahteraan masyarakat dalam hal ini para perempuan dan peneliti memilih BMT KUBE Sejahtera Sleman dengan alasan karena masih jarang ditemukan di BMT-BMT lainnya pembiayaan dengan sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwi Syam membuktikan bahwa pemberian pembiayaan tanggung renteng sudah cukup memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha anggota. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN KELOMPOK DENGAN POLA TANGGUNG RENTENG PADA USAHA MIKRO PEREMPUAN (STUDI KASUS BMT KUBE SEJAHTERA SLEMAN)”**. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dikemukakan yaitu masalah persoalan modal yang dihadapi oleh usaha mikro ini menjadikan BMT KUBE Sejahtera Sleman, membuat suatu program yaitu pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng, permasalahannya adalah ketika program tersebut tidak efektif dan tidak berpengaruh untuk pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti. Oleh karena itu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng yang diberikan oleh BMT KUBE Sejahtera pada usaha mikro perempuan ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng pada usaha mikro perempuan setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT KUBE Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat kita ketahui penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng yang diberikan oleh BMT KUBE Sejahtera Sleman berdasarkan penilaian nasabah usaha mikro perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng pada usaha mikro perempuan setelah

adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT KUBE Sejahtera Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi kalangan akademis, praktisi, maupun pemegang kebijakan yaitu pemerintah. Adapun beberapa manfaat penelitian yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca skripsi ini, dan bagi pribadi peneliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi sumbangan penting bagi para pengkaji dan praktisi lembaga keuangan mikro Islam khususnya BMT terkait dengan hal pembiayaannya.

3. Bagi BMT KUBE Sejahtera Sleman

Menjadi motivasi bagi BMT KUBE Sejahtera untuk terus meningkatkan kinerja pembiayaannya agar benar-benar dapat memberdayakan umat melalui kegiatannya sesuai dengan syariah Islam.

4. Bagi Pemerintah

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam hal kebijakan guna meningkatkan produktifitas masyarakat melalui pembiayaan produktif pada usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan yaitu pemerintah untuk memberikan dukungan melalui kebijakan khusus terkait dengan pengembangan lembaga keuangan mikro Islam seperti *Baitul Maal waa Tanwil* (BMT).